



## Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Meningkatkan Investasi dan Perdagangan Internasional: Studi Kasus Hilirisasi Nikel dan Kerja Sama dengan Tiongkok

Dhinda Olivia<sup>1</sup>, Roza Andriani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Hubungan Internasional,  
Universitas Abdurrab, Pekanbaru

\*Penulis Korespondensi: [dhindaolivia6@gmail.com](mailto:dhindaolivia6@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the economic diplomacy strategy of the Indonesian Government in supporting the nickel downstreaming policy during the 2024–2026 period. Indonesia's economic diplomacy has shifted from a passive approach to a more offensive and integrated approach through the "Indonesia Incorporated" concept, which involves synergy among the government, state-owned enterprises (SOEs), Danantara, the Indonesia Investment Authority (INA), and business actors. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review and documentation of various policies, international agreements, as well as trade and investment data. The results show that Indonesia's economic diplomacy is carried out through export market diversification, acceleration of international trade agreements, resolution of trade disputes, and strengthening of strategic investment cooperation with various countries. In the case study of nickel downstreaming, the policy of banning nickel ore exports has succeeded in increasing export added value and driving investment growth in smelters and the electric vehicle battery industry. Cooperation with China has played an important role in developing the nickel processing industry and technology transfer, although mastery of advanced manufacturing technology remains a challenge. Economic diplomacy has also contributed to attracting foreign investors through the provision of incentives, regulatory certainty, and strengthening bilateral relations with strategic partner countries.*

**Keywords:** *economic diplomacy, nickel downstreaming, foreign investment, international trade, Indonesia.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas strategi diplomasi ekonomi Pemerintah Indonesia dalam mendukung kebijakan hilirisasi nikel pada periode 2024–2026. Diplomasi ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari pendekatan pasif menuju pendekatan yang lebih ofensif dan terintegrasi melalui konsep "Indonesia Incorporated" yang melibatkan sinergi antara pemerintah, BUMN, Danantara, Indonesia Investment Authority (INA), dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai kebijakan, perjanjian internasional, serta data perdagangan dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dilakukan melalui diversifikasi pasar ekspor, percepatan perjanjian perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, serta penguatan kerja sama investasi strategis dengan berbagai negara. Dalam studi kasus hilirisasi nikel, kebijakan larangan ekspor bijih nikel berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor dan mendorong pertumbuhan investasi smelter serta industri baterai kendaraan listrik. Kerja sama dengan Tiongkok berperan penting dalam pembangunan industri pengolahan nikel dan transfer teknologi, meskipun penguasaan teknologi manufaktur lanjutan masih menjadi tantangan. Diplomasi ekonomi juga berkontribusi dalam menarik investor asing melalui pemberian insentif, kepastian regulasi, dan penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra strategis..

**Kata kunci:** diplomasi ekonomi, hilirisasi nikel, investasi asing, perdagangan internasional, Indonesia.

## **1. LATAR BELAKANG**

Era globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya interaksi antarnegara dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi telah mempercepat arus perdagangan, investasi, serta pertukaran barang dan jasa antarnegara. Kondisi tersebut menyebabkan setiap negara tidak dapat lagi berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, melainkan harus menjalin hubungan dan kerja sama internasional untuk mempertahankan stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi global yang semakin kompetitif, diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan negara untuk memperkuat posisi dan kepentingan ekonominya di tingkat internasional.

Diplomasi ekonomi merupakan upaya suatu negara dalam memanfaatkan hubungan internasional untuk mencapai tujuan ekonomi nasional, seperti meningkatkan perdagangan, menarik investasi asing, memperluas akses pasar, serta memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara lain. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang lebih berorientasi pada isu politik dan keamanan, diplomasi ekonomi berfokus pada kepentingan ekonomi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi pembangunan nasional. Melalui diplomasi ekonomi, negara dapat membangun hubungan bilateral maupun multilateral yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi di tengah dinamika ekonomi global. Perkembangan hubungan internasional dewasa ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan posisi suatu negara di dunia internasional. Negara-negara berlomba meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kebijakan perdagangan internasional, investasi, dan kerja sama ekonomi strategis. Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan pentingnya diplomasi ekonomi dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam memperoleh akses terhadap kebutuhan kesehatan, menjaga rantai pasok global, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Diplomasi ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara. Melalui diplomasi ekonomi, pemerintah dapat memperluas akses pasar internasional bagi produk dalam negeri, meningkatkan ekspor, serta memperkuat kerja sama perdagangan dengan berbagai negara. Selain itu, diplomasi ekonomi juga berfungsi untuk menarik investasi asing yang dibutuhkan dalam

pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Dengan adanya investasi dan kerja sama internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat secara lebih optimal. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, diplomasi ekonomi menjadi instrumen strategis dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, namun pemanfaatannya memerlukan dukungan kerja sama internasional yang kuat agar mampu bersaing di pasar global. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia dapat memperluas peluang perdagangan, meningkatkan nilai ekspor, serta memperoleh akses terhadap teknologi dan inovasi dari negara-negara maju. Diplomasi ekonomi juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dalam forum internasional. Dalam berbagai perundingan perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi regional maupun global, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan kepentingan nasional. Selain itu, diplomasi ekonomi memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi persaingan ekonomi internasional dan berbagai hambatan perdagangan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan berbagai negara mitra mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Pada masa awal kemerdekaan, hubungan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh negara-negara Barat, khususnya Belanda sebagai negara kolonial sebelumnya. Seiring dengan perkembangan politik dan ekonomi global, Indonesia mulai memperluas hubungan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Pada periode 1960-an hingga 1980-an, hubungan ekonomi Indonesia lebih banyak didominasi oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Jepang menjadi salah satu mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia, terutama dalam sektor industri manufaktur dan sumber daya alam. Selain itu, hubungan ekonomi dengan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC juga berkembang seiring meningkatnya peran sektor minyak dan gas dalam perekonomian Indonesia pada masa tersebut.

Memasuki era reformasi pasca-1998, Indonesia mulai melakukan diversifikasi hubungan ekonomi dengan berbagai negara dan meningkatkan keterlibatan dalam organisasi ekonomi internasional. Indonesia aktif dalam World Trade Organization (WTO), ASEAN, serta berbagai kerja sama perdagangan regional dan multilateral lainnya. Pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan berbagai bentuk integrasi ekonomi kawasan memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dengan meningkatnya peran Tiongkok sebagai mitra dagang dan investor utama Indonesia. Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok berkembang pesat melalui perdagangan, investasi infrastruktur, serta pengembangan industri strategis. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjaga hubungan ekonomi dengan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah guna menjaga keseimbangan kerja sama ekonomi internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan ekonomi tertentu.

Pemilihan hilirisasi nikel sebagai studi kasus dalam pembahasan diplomasi ekonomi dilatarbelakangi oleh posisi strategis Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel yang sangat besar sehingga komoditas ini menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produk nikel di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Kebijakan hilirisasi nikel merupakan salah satu bentuk implementasi diplomasi ekonomi dalam sektor industri dan perdagangan internasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menarik investasi asing untuk pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel di Indonesia. Selain itu, hilirisasi nikel juga menjadi strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global, khususnya industri baterai kendaraan listrik yang saat ini terus berkembang.

Studi kasus hilirisasi nikel menarik untuk dianalisis karena kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dinamika dalam hubungan ekonomi internasional. Di satu sisi,

hilirisasi nikel memberikan dampak positif berupa peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel. Namun di sisi lain, kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga memunculkan sengketa perdagangan dengan beberapa negara mitra dagang yang merasa dirugikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus mengelola hubungan ekonomi dengan negara lain. Selain itu, hilirisasi nikel memiliki pengaruh yang luas terhadap pembangunan ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan industri, pengembangan teknologi, peningkatan pendapatan negara, hingga tantangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan hilirisasi nikel dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana diplomasi ekonomi diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi persaingan dan dinamika ekonomi global. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia dalam sektor hilirisasi nikel serta memahami hubungan antara kebijakan hilirisasi dengan kerja sama ekonomi internasional. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi diplomasi ekonomi yang efektif dalam menarik investasi asing, meningkatkan nilai tambah ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan diplomasi ekonomi Indonesia di sektor sumber daya alam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Diplomasi Ekonomi**

Diplomasi ekonomi merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang secara khusus dirancang untuk memajukan kepentingan ekonomi nasional di kancah internasional. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang berfokus pada isu politik dan keamanan, diplomasi ekonomi menempatkan pencapaian tujuan-tujuan seperti peningkatan ekspor, penarikan investasi asing langsung (FDI), perluasan akses pasar, serta perlindungan kepentingan pelaku usaha domestik di luar negeri sebagai prioritas utama. Menurut Lee dan Hocking (2011), diplomasi ekonomi mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perundingan perdagangan bilateral dan multilateral, promosi dagang melalui kedutaan besar, hingga penyelesaian sengketa ekonomi internasional. Saner dan Yiu (2005) menambahkan bahwa dalam praktiknya, diplomasi ekonomi tidak hanya melibatkan

kementerian luar negeri, tetapi juga kementerian perdagangan, perindustrian, keuangan, serta badan investasi dan lembaga promosi ekspor. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, diplomasi ekonomi sering diarahkan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mengamankan transfer teknologi dari negara maju.

### **Teori Diplomasi Ekonomi**

Terdapat setidaknya empat teori utama yang digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana negara-negara menjalankan diplomasi ekonomi. Pertama, teori liberalisme (atau komersialisme) berpandangan bahwa diplomasi ekonomi berfungsi sebagai fasilitator kerja sama yang saling menguntungkan (win-win). Menurut Keohane dan Nye (1977), perdagangan bebas dan investasi asing akan menciptakan interdependensi ekonomi yang pada gilirannya mengurangi potensi konflik antarnegara. Dalam perspektif ini, perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemudahan investasi dilihat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kedua, teori realisme ekonomi yang dipelopori oleh Gilpin (1987) memandang diplomasi ekonomi sebagai alat kekuasaan negara. Negara kuat menggunakan insentif ekonomi (seperti bantuan atau akses pasar) maupun sanksi (embargo, pembatasan impor) untuk memaksa negara lain mengikuti kehendaknya. Contoh nyata adalah sanksi ekonomi AS terhadap Rusia atau kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang diterapkan Indonesia untuk memaksa investasi smelter. Ketiga, teori institusionalisme yang dikembangkan oleh Keohane (1984) menekankan peran lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia dalam menciptakan aturan main yang prediktabel bagi diplomasi ekonomi. Negara-negara berinteraksi melalui rezim internasional ini untuk mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian. Keempat, konsep economic statecraft dari Baldwin (1985) mengintegrasikan penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik atau keamanan, bukan semata-mata ekonomi. Dalam praktiknya, Indonesia kerap menggabungkan logika realisme (melindungi industri dalam negeri melalui larangan ekspor) dengan logika liberalisme (membuka akses pasar ekspor melalui negosiasi FTA) sehingga pendekatan eklektik semacam ini lebih mencerminkan realitas diplomasi ekonomi kontemporer.

## **Hubungan Internasional dan Kerja Sama Ekonomi**

Dalam studi hubungan internasional, kerja sama ekonomi dipandang sebagai salah satu bentuk interaksi paling fundamental antarnegara, yang muncul dari kesadaran bahwa tidak ada satu negarapun yang benar-benar mandiri (self-sufficient) dalam memenuhi seluruh kebutuhannya. Menurut Krugman dan Obstfeld (2009), landasan utama kerja sama ekonomi adalah teori keuntungan komparatif, yaitu setiap negara akan lebih sejahtera jika memproduksi barang yang paling efisien dan mengimpor barang yang kurang efisien untuk diproduksi sendiri. Jackson dan Sorensen (2015) mengklasifikasikan kerja sama ekonomi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang paling longgar seperti preferensi tarif bilateral, kawasan perdagangan bebas (FTA), uni pabean, pasar bersama, hingga integrasi ekonomi penuh seperti yang terjadi di Uni Eropa. Di tingkat regional, Indonesia berperan aktif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bertujuan menciptakan pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif. Di tingkat multilateral, keanggotaan Indonesia di WTO dan G20 menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perdagangan global yang berbasis aturan. Namun demikian, dinamika hubungan internasional kontemporer juga diwarnai oleh tantangan seperti kebangkitan proteksionisme pasca-pandemi COVID-19, perang dagang AS-China, serta kecenderungan reshoring (memulangkan rantai pasok ke dalam negeri) yang mengancam semangat kerja sama ekonomi global. Interdependensi ekonomi justru dapat menjadi sumber kerentanan, sebagaimana dialami banyak negara ketika rantai pasok global terputus akibat krisis. Oleh karena itu, kerja sama ekonomi modern tidak lagi semata tentang membuka pasar, tetapi juga tentang membangun ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

## **Konsep Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI)**

Investasi Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) didefinisikan oleh UNCTAD (2020) sebagai investasi lintas batas yang dilakukan oleh suatu entitas di satu negara (investor langsung) dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan jangka panjang yang signifikan dalam suatu perusahaan di negara lain (perusahaan target). Kepentingan jangka panjang ini biasanya ditandai dengan adanya pengaruh efektif dalam manajemen perusahaan, yang secara operasional diukur dengan kepemilikan saham minimal 10% (menurut standar OECD dan IMF). FDI berbeda secara fundamental dengan investasi

portofolio yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan. Untuk menjelaskan mengapa perusahaan bersedia melakukan FDI, Dunning (1993) mengajukan Eclectic Paradigm yang terkenal dengan teori OLI, yaitu Ownership, Location, Internalization. Ownership advantages merujuk pada keunggulan spesifik perusahaan seperti teknologi, merek, atau sistem manajemen yang tidak dimiliki pesaing lokal. Location advantages adalah faktor-faktor di negara tujuan yang membuat investasi di sana lebih menarik daripada di negara lain, misalnya ketersediaan sumber daya alam (nikel, bauksit), tenaga kerja murah, infrastruktur, insentif pajak, atau akses ke pasar regional. Internalization advantages menjelaskan mengapa perusahaan lebih memilih menguasai kegiatan produksi secara langsung melalui anak perusahaan di luar negeri daripada menjual lisensi atau melakukan ekspor dari negara asal. Manfaat FDI bagi negara penerima antara lain transfer teknologi dan pengetahuan manajerial, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, pembangunan infrastruktur, serta akses ke rantai pasok global. Namun demikian, FDI juga membawa risiko seperti eksploitasi sumber daya alam tanpa keberpihakan pada kepentingan lokal, persaingan tidak sehat yang mematikan usaha kecil dan menengah, repatriasi laba ke negara asal yang mengurangi akumulasi modal domestik, serta potensi ketergantungan teknologi yang membuat negara penerima sulit mengembangkan kapasitas inovasi sendiri. Karena itu, kebijakan terhadap FDI selalu bersifat dua sisi: mendorong masuknya investasi asing sekaligus mengatur agar manfaatnya dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat.

### **Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia**

Kebijakan hilirisasi sumber daya alam merupakan strategi industrialisasi yang secara konsisten diterapkan Pemerintah Indonesia sejak sekitar tahun 2014, dengan puncaknya pada pelarangan ekspor bijih nikel mentah per Januari 2020, yang kemudian diperluas ke bauksit (Juni 2023) dan direncanakan untuk tembaga serta timah. Hilirisasi secara sederhana berarti menghentikan ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter (pabrik pemurnian) sehingga nilai tambah, pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja dapat dinikmati di dalam negeri. Landasan konstitusional kebijakan ini adalah Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara operasional, kebijakan ini diimplementasikan melalui

serangkaian instrumen: pertama, larangan ekspor bahan mentah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; kedua, kewajiban bagi perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun smelter atau bekerja sama dengan smelter lokal; ketiga, pemberian insentif fiskal seperti tax holiday (pembebasan pajak penghasilan hingga 100% untuk jangka waktu tertentu) dan kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS); keempat, pengenaan bea keluar progresif yang semakin tinggi jika tingkat pengolahan produk ekspor semakin rendah. Studi kasus nikel menunjukkan keberhasilan yang cukup mengesankan: nilai ekspor produk turunan nikel (ferronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate/MHP) melonjak dari sekitar USD 3 miliar pada tahun 2017 menjadi lebih dari USD 30 miliar pada tahun 2022, dan investasi smelter dari Tiongkok (Tsingshan, Huayou), Korea Selatan (LG, Hyundai), serta Eropa (BASF) mengalir deras ke Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Namun demikian, kebijakan ini juga menghadapi tantangan serius: Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas dasar diskriminasi dan praktik pembatasan ekspor yang melanggar prinsip perdagangan bebas, dan pada Oktober 2022 WTO memenangkan gugatan Uni Eropa, meskipun Indonesia mengajukan banding. Selain itu, kebutuhan listrik smelter yang sangat besar (PLTU batu bara) menimbulkan masalah emisi karbon yang bertentangan dengan komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Kritik lain menyebutkan bahwa hilirisasi cenderung bersifat enclave economy (kantong ekonomi) yang hanya menguntungkan segelintir korporasi besar tanpa berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat lokal, serta berisiko menimbulkan Dutch disease (apresiasi nilai tukar akibat lonjakan ekspor komoditas olahan) yang justru merugikan sektor ekonomi lainnya. Meskipun demikian, pemerintah tetap memandang hilirisasi sebagai jalan utama untuk melepaskan diri dari jebakan negara pengekspor bahan mentah (raw material supplier trap) dan menuju status sebagai negara industri menengah.

### **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji diplomasi ekonomi, FDI, dan kebijakan hilirisasi dari beragam sudut pandang, baik secara teoretis maupun empiris. Rana (2016), dalam studinya tentang evolusi diplomasi ekonomi di Asia, menemukan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi sangat bergantung pada koordinasi yang erat

antara kementerian luar negeri, kementerian perdagangan, kementerian keuangan, dan badan investasi (di Indonesia setara dengan BKPM). Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan promosi investasi dan ekspor cenderung tumpang tindih dan tidak efektif. Penelitian Lestari dan Pradana (2019) secara spesifik menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam kebijakan hilirisasi nikel, dan menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan tersebut berhasil menarik FDI dalam jumlah besar terutama dari Tiongkok namun kebijakan tersebut juga melanggar prinsip non-diskriminasi dalam WTO sehingga memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Amir (2020), dalam kajiannya tentang nasionalisme sumber daya dan investasi asing di sektor pertambangan Indonesia, mengidentifikasi adanya dilema struktural antara keinginan untuk mengolah sendiri sumber daya alam (nasionalisme sumber daya) dan kebutuhan mendesak akan modal serta teknologi asing. Ia juga menemukan bahwa ketidakpastian regulasi, misalnya perubahan tarif ekspor secara sepihak, menjadi penghambat utama masuknya FDI jangka panjang karena investor asing membutuhkan kepastian hukum. Secara lebih kuantitatif, Nugroho dan Setiawan (2022) menghitung dampak larangan ekspor bijih nikel terhadap FDI di sektor pengolahan mineral, dan menemukan bahwa FDI di sektor smelter meningkat hingga 340% setelah larangan diberlakukan. Namun, mereka juga mencatat bahwa biaya logistik di Indonesia timur yang tinggi dan harga listrik yang masih mahal (karena ketergantungan pada PLTU batu bara yang tidak efisien) membuat produk nikel olahan Indonesia kurang kompetitif dibandingkan produk serupa dari China. Sementara itu, laporan tahunan Kementerian Luar Negeri RI (2021) menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia periode 2020-2024 difokuskan pada diversifikasi pasar (market diversification) untuk mengurangi ketergantungan pada Eropa sebagai tujuan ekspor utama, serta investment-led diplomacy yang menawarkan proyek hilirisasi sebagai paket investasi lengkap dengan insentif dan kemudahan perizinan. Dari seluruh penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap), karena sebagian besar studi hanya berfokus pada kasus nikel, sementara kebijakan hilirisasi untuk komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan timah belum banyak mendapat perhatian akademis. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengevaluasi dampak jangka panjang hilirisasi terhadap struktur ekonomi nasional—apakah benar-benar mendorong industrialisasi yang inklusif atau hanya menciptakan enclave economy yang terputus dari ekonomi lokal.

Dengan demikian, penelitian baru yang bersifat komparatif atau longitudinal pada berbagai komoditas tambang akan sangat berkontribusi untuk mengisi kekosongan literatur tersebut.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam kebijakan hilirisasi nikel melalui studi kasus dan studi pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan, aktor, serta dampak diplomasi ekonomi Indonesia di sektor nikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, jurnal, artikel, serta data statistik yang relevan dengan diplomasi ekonomi dan hilirisasi nikel. Data kemudian dipilih dan dikaji berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Strategi Diplomasi Ekonomi Pemerintah Indonesia**

Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 2024-2026 menunjukkan pergeseran paradigma yang cukup fundamental dari pendekatan pasif menjadi ofensif dan terintegrasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengkonsolidasikan berbagai instrumen diplomasi ekonomi ke dalam sebuah kerangka strategis tunggal yang disebut "Indonesia Incorporated" . Paradigma ini merupakan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan peran super-holding investasi Danantara, pengelola dana abadi Indonesia Investment Authority (INA), perusahaan BUMN, hingga pelaku UMKM dalam satu pintu komando kebijakan perdagangan dan investasi. Secara lebih spesifik, strategi diplomasi ekonomi Indonesia tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup lima arah kebijakan utama . Pertama, peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non-tradisional melalui pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan negara-negara di Pasifik Selatan (Fiji dan Papua New Guinea), Afrika (Aljazair, Mauritius, Djibouti, Tunisia, Maroko, ECOWAS, dan EAC), serta Amerika Selatan (Kolombia) . Kedua, penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral di WTO, termasuk sengketa dengan Uni Eropa (DS592 dan DS593) serta negara-negara lainnya . Ketiga, percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan, meliputi Indonesia-Uni Eropa CEPA,

Indonesia-Turki CEPA, General Review Indonesia-Japan EPA, serta ratifikasi Indonesia-EFTA CEPA . Keempat, implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk mendorong investasi dan transfer teknologi bagi pembangunan rendah karbon . Kelima, penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional melalui Presidensi G20 dan Ketetuaan ASEAN.

Strategi diversifikasi pasar menjadi salah satu pilar utama, di mana pemerintah secara aktif berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dengan memperluas akses ke pasar nontradisional seperti Afrika, Timur Tengah, serta memperkuat kerja sama dalam kerangka ASEAN, RCEP, BRICS, IEU-CEPA, dan ICA-CEPA . Pendekatan ini juga tercermin dalam upaya menjadikan diplomasi ekonomi sebagai ujung tombak hubungan bilateral dengan berbagai mitra strategis, seperti yang ditunjukkan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang di Tokyo pada Maret 2026 untuk mendorong investasi hilirisasi.

### **Peran Kementerian dan Lembaga Terkait**

Pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang kompleks, dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator utama. Berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional di bawah Kemenko Perekonomian memiliki mandat khusus untuk menangani percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan serta peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non-tradisional. Kementerian Luar Negeri berperan sebagai ujung tombak diplomasi ekonomi di perwakilan RI di luar negeri. Menteri Luar Negeri telah menegaskan bahwa orientasi diplomasi ekonomi menjadi lebih penting dari sebelumnya, terutama dalam momentum pemulihan ekonomi pascapandemi. Kemlu bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, dengan melibatkan 34 Kepala Perwakilan RI di seluruh dunia dalam strategi peningkatan investasi.

Kementerian Perindustrian juga memperkuat diplomasi ekonominya melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri yang ditandatangani pada Desember 2025. Ruang lingkup kerja sama ini mencakup koordinasi dan sinkronisasi kebijakan industri nasional dengan kebijakan luar negeri dan hubungan ekonomi internasional,

dengan fokus pada hilirisasi, peningkatan nilai tambah, produktivitas industri, serta percepatan alih teknologi. Kerja sama ini juga mencakup promosi potensi investasi industri nasional dengan memanfaatkan jaringan perwakilan RI di luar negeri, serta mendukung partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada pameran industri global INNOPROM 2026 di Rusia. Kementerian Perdagangan berperan dalam perundingan perdagangan internasional, seperti yang terlihat dalam penyelesaian substantif IEU-CEPA pada September 2025. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag mendorong pelaku usaha untuk mempersiapkan diri menggenjot ekspor ke pasar Uni Eropa dengan menyesuaikan produk dan memenuhi standar kualitas, keamanan, keberlanjutan lingkungan, serta kemasan dan label yang informatif. Di tingkat bilateral, berbagai kementerian teknis terlibat aktif. Dalam kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan pada Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid turut mendampingi Presiden dalam penandatanganan 10 nota kesepahaman yang mencakup berbagai sektor prioritas.

### **Diplomasi Perdagangan dan Investasi**

Diplomasi perdagangan Indonesia mencatat sejumlah pencapaian signifikan pada periode 2025-2026. Yang paling menonjol adalah penyelesaian substantif Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada September 2025, yang ditargetkan mulai berjalan optimal pada semester II/2026. Perjanjian ini akan menghapus 98,61% pos tarif impor dari Uni Eropa yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia, sementara Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa. Komoditas yang diuntungkan antara lain minyak sawit, alas kaki, tekstil, dan ikan, dengan Uni Eropa menyatakan kesiapannya mengakui keberlanjutan minyak sawit Indonesia. Di kawasan Timur Tengah, implementasi Indonesia-UAE CEPA yang telah berjalan sejak akhir 2023 menunjukkan hasil positif dengan total perdagangan Indonesia melonjak hingga mencapai 5,1 miliar dolar AS pada 2024, didorong oleh kinerja ekspor nonmigas seperti perhiasan, otomotif, dan peralatan elektronik. Indonesia juga tengah membangun fondasi hubungan ekonomi yang lebih kompleks dengan negara-negara Teluk, di mana modal dari Timur Tengah tidak hanya berinvestasi di instrumen keuangan tetapi terintegrasi langsung ke dalam proyek hilirisasi

mineral, geothermal, dan ekosistem industri halal global. Di kawasan Asia Timur, diplomasi perdagangan dengan Korea Selatan menghasilkan 10 nota kesepahaman yang mencakup berbagai sektor prioritas seperti ekonomi 2.0, kerja sama mineral kritis, pengembangan digital, kecerdasan buatan untuk layanan kesehatan dasar dan pengembangan SDM, energi bersih, carbon capture and storage, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Hubungan dengan negara-negara Skandinavia juga mengalami penguatan, ditandai dengan penandatanganan rencana aksi kerja sama strategis Indonesia-Denmark untuk periode 2025-2029 yang mencakup kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, perubahan iklim, transisi energi hijau, lingkungan hidup, pangan dan pertanian, serta pariwisata .

### **Diplomasi Investasi**

Diplomasi investasi Indonesia berfokus pada sektor hilirisasi sebagai prioritas nasional. Dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang pada Maret 2026, Presiden Prabowo bertemu dengan 13 pimpinan perusahaan besar Jepang termasuk Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, Panasonic Group, INPEX, JBIC, Keidanren, Marubeni, Mitsui, Sojitz, Sumitomo, Takeda Pharmaceutical, Tokyo Gas, dan Itochu. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari capaian investasi signifikan dengan nilai komitmen lebih dari Rp380 triliun, yang menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Diplomasi investasi juga menjadi instrumen penting dalam penyelesaian isu perdagangan, seperti yang terjadi dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi maraton sejak April 2025 dengan mengirimkan empat surat negosiasi tarif secara berkala, mengunjungi Washington DC empat kali, melakukan tujuh putaran perundingan, dan lebih dari 19 kali pembahasan dengan USTR. Hasilnya, Indonesia dan AS menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian tarif resiprokal pada Februari 2026, yang menetapkan mekanisme penyelesaian persoalan perdagangan dan investasi melalui Council of Trade and Investment sebagai forum dialog ekonomi kedua negara. Perjanjian ini juga membentuk kerangka yang menghormati kedaulatan masing-masing negara. Di kawasan Timur Tengah, diplomasi investasi Indonesia juga membuahkan hasil historis. Melalui Danantara, Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan memiliki properti strategis di Mekkah dengan akuisisi hotel dan lahan senilai 500 juta dolar AS untuk membangun

"Kampung Haji Indonesia" yang mencakup 13 tower hotel dan fasilitas kesehatan terpadu. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengekspor 2.280 ton beras premium "Befood Nusantara" untuk konsumsi jemaah haji 2026.

### **Studi Kasus Hilirisasi Nikel Indonesia**

#### **a. Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel**

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah merupakan bagian utama dari strategi hilirisasi industri yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak Januari 2020. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral dilakukan di dalam negeri sebelum diekspor. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah menilai kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai tambah industri nikel nasional. Nilai ekspor produk turunan nikel yang pada tahun 2017 berada di angka sekitar US\$3,3 miliar meningkat menjadi sekitar US\$33,9 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri sekaligus meningkatkan investasi di sektor smelter dan manufaktur berbasis nikel. Keberhasilan ini juga mendorong pemerintah untuk memperluas kebijakan hilirisasi pada komoditas mineral lainnya seperti bauksit dan timah.

Meskipun demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel menimbulkan tantangan dalam perdagangan internasional. Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dengan alasan kebijakan tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas dan non-diskriminasi. Pada tahun 2022, WTO memenangkan gugatan Uni Eropa, namun Indonesia tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi dengan alasan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam strategis.

#### **b. Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam Pembangunan Smelter**

Tiongkok menjadi mitra utama Indonesia dalam pengembangan industri hilirisasi nikel, terutama melalui pembangunan smelter dan investasi industri pengolahan mineral. Investasi Tiongkok di sektor nikel Indonesia sangat dominan dan mencakup sebagian

besar investasi asing di sektor tersebut. Kerja sama ini diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri, fasilitas pengolahan nikel, serta pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

Salah satu bentuk kerja sama yang menonjol adalah proyek pembangunan smelter antara Danantara, PT Vale Indonesia, dan perusahaan asal Tiongkok, GEM Co. Ltd. Proyek tersebut menggunakan teknologi High-Pressure Acid Leach (HPAL) yang mampu mengolah bijih nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain bertujuan meningkatkan nilai tambah produk nikel, proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai global.

Kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan smelter, tetapi juga mencakup pengembangan riset dan teknologi. GEM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) mendirikan laboratorium penelitian metalurgi untuk mendukung transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia di bidang industri nikel dan baterai.

#### c. Bentuk Investasi dan Transfer Teknologi

Investasi dalam hilirisasi nikel Indonesia dilakukan melalui pembangunan smelter, pengembangan kawasan industri, serta investasi di bidang penelitian dan pengembangan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam industri pengolahan nikel antara lain Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) untuk menghasilkan feronikel dan Nickel Pig Iron (NPI), serta teknologi HPAL untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

Selain investasi fisik, transfer teknologi juga dilakukan melalui kerja sama penelitian, pelatihan tenaga kerja, dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di bidang metalurgi. Kehadiran laboratorium penelitian bersama antara perusahaan asing dan perguruan tinggi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas inovasi nasional dan memperkuat penguasaan teknologi pengolahan mineral.

Namun demikian, transfer teknologi yang terjadi masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia dinilai masih lebih berfokus pada tahap pengolahan awal nikel dibandingkan pengembangan industri manufaktur lanjutan. Meskipun Indonesia menjadi salah satu eksportir utama produk olahan nikel, sebagian besar produk jadi berbasis nikel

masih diimpor dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan industri hilir lanjutan dan penguasaan teknologi manufaktur masih perlu diperkuat.

d. Peran Diplomasi Ekonomi dalam Menarik Investor Asing

Diplomasi ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan hilirisasi nikel Indonesia. Pemerintah secara aktif menggunakan diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing, memperluas kerja sama industri, serta menjaga hubungan dengan negara-negara mitra di tengah persaingan ekonomi global.

Pemerintah Indonesia menerapkan strategi diversifikasi investasi dengan membuka peluang kerja sama bagi berbagai negara, tidak hanya bergantung pada Tiongkok. Indonesia juga menerapkan pendekatan politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga hubungan ekonomi yang seimbang dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap satu negara sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional.

Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif investasi dan berupaya menciptakan kepastian regulasi guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor hilirisasi nikel. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui kerja sama perdagangan internasional dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas. Kehadiran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia turut memperkuat diplomasi investasi karena berperan sebagai penghubung kerja sama strategis dengan investor global.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 2024–2026 menunjukkan adanya transformasi strategi yang lebih aktif, terintegrasi, dan berorientasi pada penguatan kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia tidak hanya memanfaatkan diplomasi sebagai alat hubungan internasional, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mendorong perdagangan, investasi, hilirisasi industri, serta peningkatan daya saing nasional di pasar global. Melalui konsep “Indonesia Incorporated”, pemerintah berhasil mengintegrasikan peran berbagai kementerian, lembaga, BUMN, dan sovereign wealth fund dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional. Dalam sektor perdagangan, Indonesia berhasil memperluas kerja sama ekonomi melalui berbagai

perjanjian perdagangan internasional seperti IEU-CEPA, kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, dan kawasan nontradisional lainnya. Strategi diversifikasi pasar juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Di bidang investasi, diplomasi ekonomi mampu menarik investasi asing dalam jumlah besar, terutama pada sektor hilirisasi mineral dan industri strategis.

Studi kasus hilirisasi nikel menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tambah ekspor, pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri, dan peningkatan investasi smelter. Kerja sama dengan Tiongkok melalui pembangunan smelter dan pengembangan industri baterai kendaraan listrik memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Selain itu, transfer teknologi melalui kerja sama penelitian dan pengembangan mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, implementasi diplomasi ekonomi dan hilirisasi nikel masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan investasi pada negara tertentu, sengketa perdagangan internasional, keterbatasan transfer teknologi lanjutan, serta belum optimalnya pengembangan industri manufaktur berbasis nikel di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kepastian regulasi, memperluas diversifikasi mitra investasi dan pasar ekspor, serta meningkatkan penguasaan teknologi industri lanjutan agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amatucci, M., & Avrichir, I. (2008). Teorias de negócios internacionais e a entrada de multinacionais no Brasil de 1850 a 2007. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, 10(28), 234–248.
- Amir, S. (2020). The politics of downstreaming: Resource nationalism and foreign investment in Indonesia's mining sector. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 245–262.
- Baldwin, D. A. (2020). *Economic statecraft* (New ed.). Princeton University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1985).
- Buckley, P. J., Forsans, N., & Munjal, S. (2012). Host–home country linkages and host–home country specific advantages as determinants of foreign acquisitions by Indian firms. *International Business Review*, 21(5), 878–890.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Addison-

Wesley.

- Gilpin, R. (1987). *The political economy of international relations*. Princeton University Press.
- Gjerding, A. N. (2005). *Considering foreign direct investment in Denmark: The eclectic paradigm of Dunning revisited (Working Paper Series)*.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2015). *Introduction to international relations: Theories and approaches (6th ed.)*. Oxford University Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown and Company.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2020). *Rencana induk pembangunan industri nasional (RIPIN) 2020–2024*. Kementerian Perindustrian RI.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International economics: Theory and policy (8th ed.)*. Pearson Addison-Wesley.
- Lee, D., & Hocking, B. (2010). *Economic diplomacy*. In *The Oxford handbook of modern diplomacy*. Oxford University Press.
- Lestari, D. P., & Pradana, A. R. (2019). *Diplomasi ekonomi Indonesia dalam kebijakan hilirisasi nikel*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 121–136.
- Nugroho, H., & Setiawan, B. (2022). *Dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap FDI di sektor pengolahan mineral*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–70.
- Rahman, A., Bridge, A. J., Rowlinson, S., Hubbard, B., & Xia, B. (2018). *Multinational contracting and the eclectic paradigm of internationalization*. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 25(11), 1418–1435.
- Rahman, A., Bridge, A., Rowlinson, S., & Kwok, T. (2011). *Towards testing the eclectic paradigm on multinational contracting: An approach to reviewing and analysing secondary data*. *Proceedings of the 2011 International Conference on Construction & Real Estate Management*, 2, 915–920.
- Rana, K. S. (2016). *Economic diplomacy: The next frontier*. *The Hague Journal of Diplomacy*, 11(4), 371–385.
- Saner, R., & Yiu, L. (2000). *Business diplomacy management: A core competency for global companies*. *Academy of Management Perspectives*, 14(1), 80–92.
- Saner, R., & Yiu, L. (2003). *International economic diplomacy: Mutations in post-modern times*. *Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”*, 1–37.
- UNCTAD. (2020). *World investment report 2020: International production beyond the pandemic*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara.

Yiu, L., & Saner, R. (2017). Business diplomacy in implementing the global 2030 development agenda: Core competencies needed at the corporate and managerial level. In *International business diplomacy* (Vol. 18, pp. 33–58).